PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Amina Umasangadji[1], Bakri Soamole, SE., M. Si[2], Muhammad Zais M. Samiun, SE., M.Si[3]

[1] LulusanFakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Khairun
E-mail: aminaumasangadji00@gmail.com
[2,3] DosenEkonomi Pembangunan FEB-Unkhair
bakrisoamole@gmail.com; zaisms@Unkhair.ac.id

ABSTRACT: *The Effect of Fiscal Decentralization on Economic Growth in the Sula Islands Regency. Under the guidance of: Bakri Soamole, and Muhammad Zais M. Samiun.*

The purpose of this study is to determine the effect of fiscal decentralization on economic growth in the Sula Islands Regency in 2011 – 2019. The data used are secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Sula Islands Regency and also from related agencies that have relevance to main research problem.This study uses a simple regression analysis model using SPSS version 26 as a statistical test tool.

The results of this study indicate that the Fiscal Decentralization of the Sula Islands Regency has a positive and significant impact on economic growth in the Sula Islands Regency.

Keywords: Fiscal Decentralization, Economic Growth
JEL Codes :E62

Jejak artikel :
Diterima : 10 Juli 2022
Direvisi : 21 Juli 2022
Disetujui : 04 Agustus 2022
Tersedia Online : 31 Oktober 2022

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia yang dimulai dari tahun 2001 merupakan sebuah tanjakan dari awalnya pemerintah yang bersifat sentralisasi manjadi pemerintah yang desentralisasi. Desentralisasi merupakan alat atau intrumen yang harus digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel (Bangun, 2009). Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai dengan

desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah. Dimana desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat daerah (Akai dan Sakata 2002) yang berfungsih untuk meningkatkan efisiensi sektor publik jangka panjang (Faridi,2011).

Kusuma (2016), dan Suriani (2014) Desentralisasi fiskal otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah.Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokal-nya, khususnya pendapatan asli daerah (PAD), karena kebijakan ini diiringi perlimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga dimungkinkan digali berbagai peluang sumber pendapatandaerah (lokal).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan yang diwujudkan dalam bentuk pemberiantransfer pada daerah (Pasaribu, 2012; Kharisma, 2013) sesuai dengan amanat undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan penyesuaian serta dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan daerah dalam pelaksanaa otonomi daerah adalah dengan melihat seberapa besar kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai

 ISSN: 2354-581X

dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Sumber Pendapatan Daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Dilliger, dan Sidik, (2002), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi politik (*political decentralization),* yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui per- wakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik, desentralisasi administrative (administrative decentralization), yaitu pelimpahan wewenang guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber- sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas ter-tentu atau perusahaan tertentu. Desentralisasi fiskal *(fiscal dezentralization)* yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber- sumber keuangan dan desentralisasi ekonomi *(economic or market decentralization),* yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalandengan kebijakan liberalisasi.

Otonom daerah merupakan dua sisi dalam mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan saling memberi arti. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal,pemerintahan daerah memiliki wewenang menganalisis pendapatan dan melakukan alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adanya otonom daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan pembangunan potensi masing — masing. Adanya otonomi daerah juga memungkinkan sebuah pembangunan lebih terarah dan tepat sasasran (Badarudin,2012).

Keberhasilan otonomi daerah tak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian

kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan *(tax assignment)* maupun aspek pengeluaran *(expenditure assignment).* Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik *(public goods/public service).*

Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerahpemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secarakesinambungantanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas- tugas pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pembangunan. Supriyadi,dkk (2013).

Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah(PAD) Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2011-2019

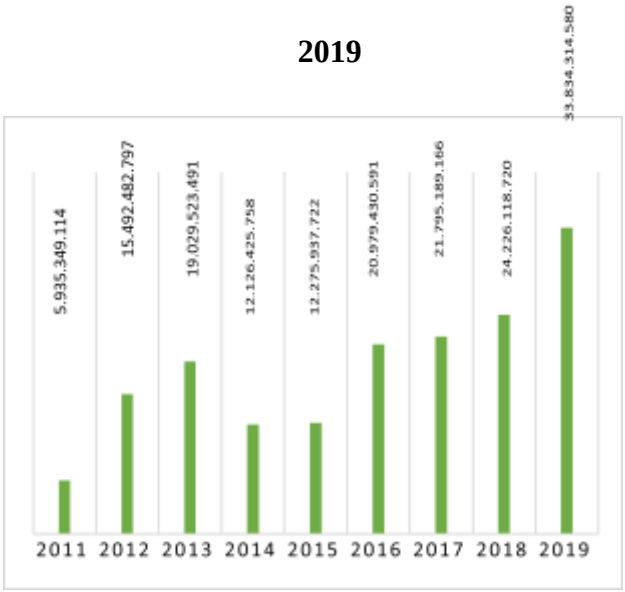

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, 2021

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan penelitian bahwa perkembangan PAD di kabupaten kepulauan sula dari tahun 2011 sampai tahun 2019 yang paling terkecil terdapat pada tahun 2011 dengan jumlah sebesar 5.935 trilyun rupiah,dan di tahun 2012 terjadi kenaikan sebesr 15.492 trilyun

 ISSN: 2354-581X

rupiah,sedangkan pada tahun 2013 masi meningkat sebesar 19.029 trilyun rupiah,dan ditahun 2014 sampai tahun 2015 terjadi penirunan sebesar 12.275 trilyun rupiah,dan ditahun 2016 sampai pada tahun 2018 terjadi lagi kenaikan sebesar 24.226 trilyun rupiah.sedangkan kenaikan terbesar terdapat pada tahun 2019 dengan jumlah sebesar 33.834 trilyun rupiah. Grafik Nilai Realisasi PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Sula Tahun2011 - 2019

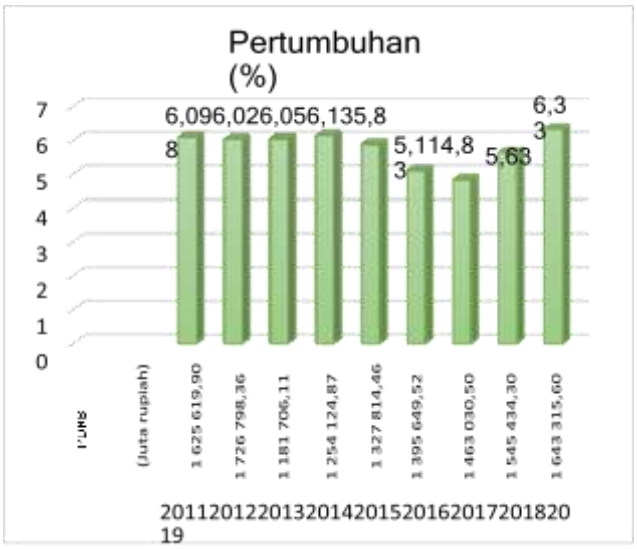

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Sula, 2021

Berdasarkan table 2 di atas penelitian dapat menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten kepulauan sula fluktuatif setiap tahunnya,di mana pada awal-awal tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan sebesar 6,13%, tetapi pada tahun 2015-2018 terjadi penurunan di mana penurunan terkecilnya terdapat pada tahun 2017 sebesar 4,83% hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada lapangan usah industri pengelolahan sebesar 0,67% dan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kepulauan sula mulai mengalami peningkatan sebesar 6,33%. Sehingga, dengan ditetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 maka diharapkan Otonomi Daerah menjadi jembatan terbaik untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk daerah/lokal melalui berbagai efek multiplier kepulauan sula fluktuatif setiap tahunnya,di mana pada awal-awal tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan sebesar 6,13%, tetapi pada tahun 2015-2018 terjadi

penurunan di mana penurunan terkecilnya terdapat pada tahun 2017 sebesar 4,83% hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan pada lapangan usah industri pengelolahan sebesar 0,67% dan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi di kabupaten kepulauan sula mulai mengalami peningkatan sebesar 6,33%. Sehingga, dengan ditetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 maka diharapkan Otonomi Daerah menjadi jembatan terbaik untuk kesejahteraan dan kemakmuran penduduk daerah/lokal melalui berbagai efek multiplier

dari desentraliasi. Secara teoritis, kehadiran kedua undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk berkembang dan menuju kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakan yang telah di kemukakan di atas,maka masalah yang menarik untuk dianalisis adalah:"**Pengaruh Desetralisasi Fiskal Terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula".**

LANDASAN TEORI

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Kebijakan desentaralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidak efektifan dan ketidak efisien pemerintahan, ketidak stabilaan ekonomi makro, dan ketidak cukupan pertumbuhan ekonomi (Bahl dan Linn, 1992). Apabilah pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surchargai of taxes, pinjaman maupun Dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Bahl (1999), mengemukakan bahwa dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip (rules) *mony should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus di perhatikan dan dilaksanakan. Artinyan, setiap pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konswengsi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.Otonomi daerah tanpa desentralisasi fiskal kurang mendukung tercapainya efektivitas penyelnggaran pemerintahan dan pelayanan publik.

 ISSN: 2354-581X

Indikator Desentralisasi Fiskal

Pendapatan dan pengeluaran yakni dua variabel umum selalu dipakai dalam mengukur desentralisasi fiskal di wilayah tertentu. Ebel dan Yilmas (2002) mengemukakan pendapat bahwa dalam menilai desentralisasi negara yang satu dan negara lain melalui variasi dalam memilih inikator.Maupun memakai variabel yang sama dalam pengeluaran dan penerimaan pemerintah, vaiabel ukuran (size variable) yang dipakai oleh peneliti satu dan peneliti yang lain adalah mendjadi pembeda.

Pendapat Shah dan Thompson dalam mengaitkan 3 komponen yang berpengaruh dengan desentralisasi fiskal yakni : (1) kelengkapan dalam penerimaan dan adanya otonomi, (2) adanya privilege dalam melakukan pinjaman (browwing privilege),dan adanya otonomi dalam pengeluaran (expenditure autonomy) dalam melihat apakah berjalan efesien atau tidak untuk desentralisasi fiskal. Sebaliknya Bhal (2002) berpendapat sama yang dikemukakan oleh Shah dan Thompson tapi maknanya sedikit berbeda, yakni :

(1) pemerintah daerah memilikan kewenangan yang signifikan dalam pengeluaran (*significant loca l govermant expenditure responsibilities*), (2) mampunya daerah dalam meminjam (*local borrowing abiiti*) dan (3) pemerintah di daerah memilika diskresi yang signifikan di dalam menaikanpenerimaan (*significant local goverment discretion to raise revenue*).

Pendapatan Daerah

Kemandirian suatu daerah dilihat dari daya kemampuannya untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu sumbernya berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD).Menurut Mardiasmo (2013) PAD adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, restribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun, mengalokasikan dan memanfaatkan

potensi sumber keuangan daerahnya dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya sendiri.

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang semakin menurun. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkatkemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk meningkatkan kemandirian daerah pemerintah daerah harus berupaya terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau penilaian sumber - sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memberi indikasi yang baik bagi kemampuan keuangan daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, sertapeningkatan pembangunan.

Harianto (2007) dimana PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi — potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri, Tambunan (2006). Sistem Hubungan Keuangan Pusat Da erah Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber- sumber keuangan daerah sebagaiberikut:

1. Sumber-sumber pendanaan keuangan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

 ISSN: 2354-581X

3. kekayaan daerah yangdipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umun (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana perimbangan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat dan mengalami perbaikan.

Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menujukkansejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu Anitasari dan Soleh, (2015), Rori (2016). Menurut Sukirno (2006) Pertumbuhan Ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu

perekonomian dalam suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurut Adisasmita (2013) Pertumbuhan Ekonomi merupakan upaya peningkatankapasitas produksi *(input)* untuk mencapai penambahan hasil *(output),* yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut menekankan pada tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Sebagian ekonom mendenifisikan pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang lebih longgar. kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selalu diharapkan oleh setiap pemerintahan yang ada karena dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pengangguran bisa berkurang, sheingga kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah atau tinggi rendahnya kualitas

aparatnya di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output nasional (Todaro dan Smith, 2006).

Menurut teori klasik pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal dapat dilakukan secara langsung ataupun dengan melakukan investasi pada fasilitas-fasilitas penunjang seperti misalnya investasi infrastruktur, ekonomi dan sosial. Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja secara tradisional menjadi faktor positif yang memicu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang banyak berarti memperbesar jumlah tenaga kerja yang produktif. Jumlah tenaga kerja yang banyak berarti ukuran pasar domestic besar. Adanya kemajuan teknologi menjadi dasar berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hubungan Desentralisasi Fiskal Dengan

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Thiessen (2003) terdapat empat hal yang menjadi argumen dasar akan manfaat diterapkannya desentralisasa fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Berlakunya Hipotesis diversikasi (*diversification hypothesis)*,dalamargumen ini menyatakan bahwa penyedian barang dan jasa publik secara seragam itu menjadikan tidak efisien.Hal ini dikarenakan perbedaan waktu terhadap permintaan barang dan jasa publik lokal di setiap daearh. Peran desentralisasi disini yaitu sumber daya yang ada dapat disimpan dan di manfaatkan berdasarkan kebutuhan masing - masing daerah pada kurun waktu yang tepat.
2.

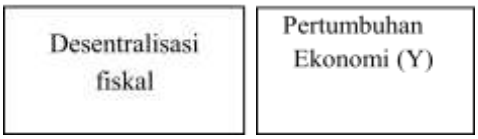

 ISSN: 2354-581X

Kebijakan desentralisasi fiskal berdampak positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya akan kekayaan alam dari pada daerah yang bukan pusat bisnis. Otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiscal pada umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah karena pemberian wewenang yang lebih luas diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi daerah sehingga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan perkapita(Waluyo, 2007:19).

KERANGKA PIKIR

Kerangka pemikiran yang tergambar merupakan konsep untuk mengungkap dan menentukan persepsi keterkaitan hubungan antara variabel yang diteliti dan diuraikan dengan kajian teori yang ditulis. Mengacu pada teori- teori yang telah dituliskan di atas maka secara garis besar penulis akan melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan sula melalui proses analisis data.

Keterangan:

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Hubungan secara parsial

Hipotesis

Rumusan Hipotesis : Suparto (1997) menyatakan bahwa hipostesi adalah pedoman dan pendapatan dalam penelitian yang dirancang sesuai dengan teori yang terkait, yang mengubungkan dua variabel atau lebih merupakan hipotesis yangdirumuskan dalam pernyataan.

Berdasarkan tinjauan kajian pustaka yang ada,berikut hipotesis yang akan diuji kebenarannya:

Diduga derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan pengamatan atas fenomena peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret– April 2021.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber datayang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dari secara berkala *(time series)* periode 2010-2019. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan DJPK (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) Kabupaten Kepulauan Sula yaitu data realisasi APBD, dan data PDRB di Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2011-2019. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti mengambil data berdasarkan dokumen- dokumen sumber seperti laporan tahunan, laporan keuangan yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJKP) serta data-data lain yang diperlukan dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data di peroleh dari instansi pemerintahan yang terkait seperti kantor BPS Kabupaten Kepulauan sula dan istansi lainnya yang terkait,serta dengan cara membaca buku-buku yang ada di perpustakaan dan data-data yang dipublikasikan melalui karya ilmiah dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan penulisan penelitian ini.

Model Analisis

 ISSN: 2354-581X

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menghubungkan satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Persamaan regresi linear sederhana digunakan untuk menget ahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu Desentralisasi Fiskal Berpengaruh terhadapvariabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

TPD :Total Pendapatan Daerah

Selain itu untuk melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dengan cara :

Kemandirian Pembiyaan

$$= \frac{PAD}{Total\ Penerimaan} \times 100\% \text{ total}$$

1. Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal

Fiscal dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerimaan,yaitu perbandingan pendekatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dengan rumusnya. Kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus Derajat DesentralisasiFiskal (DDF) dengan cara : (Siagin, 2010).

$$DDF \quad \frac{PAD}{TPD} \text{ X } 100\%$$

Dimana :

DDF : Derajat desentralisasi fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

2. Pengaruh Derajat DesenralisasiFiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.yaitu hanya terdiri atas dua variabel; variabel bebas (x) dan variabel terikat (y) :

$$Y=\alpha+\beta X+e$$

Dimana :

Y : Pertumbuhan Ekonomi

α : Nila Konstanta *(intercept)*

β : Koefisien regresi (*slop*)

x : Derajat Desentralisasi Fiskal

e :Faktor pengganggu (*disturbancentre)*

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakter yang di amati yang memungkinkan penelitian untuk melakukan observasi atau pengukuran scara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. (Anting,2006). Definisi variabel dalampenelitian ini adalah :

1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi berarti penyerahan kewewenangan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah/daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Republik Indonesia. Dimana Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebihrendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai degan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

2. Pertumbuhan ekonomi

 ISSN: 2354-581X

Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun yangdinyatakan dalam persentasi (%).

HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

Gambaran Umum Ojek Penelitian

Awalnya, Kepulauan Sula terdiri dari 3 pulau besar yaitu Pulau Sulabesi, Pulau Mangoli dan Pulau Taliabu yang mana di dalamnya terdapat berbagai kecamatan danDesa. Namun semenjak tahun 2014, berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, Pulau Taliabu secara administratif berdiri sebagai kabupaten baru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 4 tahun 2011 tentang pemekaran desa, wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Sula mengalami perubahan jumlah desa, dimana saat ini jumlah desa di Kabupaten Kepulauan Sula sebanyak 80 desa yang tersebar di Pulau Sulabesi dan Pulau Mangoli. Satu desa yang baru adalah Desa Jere yang merupakan pecahan desa Mangoli di Kecamatan Mangoli Tengah

Geografis Wilayah

Luas wilayah daratan Kabupaten KepulauanSula adalah seluas 13.732,7 km², kabupaten ini terdiri dari 2 (dua) pulau besaryakni Pulau Sulabesi, dan Pulau Mangole, serta terdiri dari 17 pulau sedang

		UnstandardizedResidual
N		9
Normal Parameters[a,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1,31712949
Most Extreme Differences	Absolute	0,323
	Positive	0,323
	Negative	-0,249
Test Statistic		0,323
Asymp. Sig.(2-tailed)		.700[c,d]

dan kecil yang secara keseluruhan terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan definitif dan 13 Kecamatan Pemekaran (PERDA Nomor 2 Tahun 2006) dan 124 Desa. Secara astronomis, wilayah kabupaten ini terletak di 125°19'42– 126°29'11 Bujur Timur dan 01°45'08– 02°28'39 Lintang Selatan.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

1. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menentukan apakah variabel — variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian

adalah data yang memiliki distribusi normal. Jika sig. > 0,05 maka data berdistribusi dengan normal, jika sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal. Adapun alat yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov dalam program SPSS 26. Hasil analisis terhadap asumsi normalitas terhadap nilai asumsi normalitas terhadap nilai residual dari persamaan regresi disajikan dalamtabel sebagai beriku:

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Test distribution is Normal.Calculated from data. Lilliefors Significance Correction.This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.5 diatas dengan menggunakan metode *one sa mpel kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel independen pada jumlah sampel (N = jumlah tahun penelitian) sebesar 9 adalah 0,700. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih

 ISSN: 2354-581X

besar dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau 0,700>0,05 sehingga model regresi dapat digunakanuntuk pengujian hipotesis.

2. Uji Linieritas

Uji ini merupakan uji tentang linieritas model yang di amati di dalam Anova Tabel. Untuk menetapkan data Independen dan dependen tersebut ada hubungan atau tidak itu dengan cara mengamati Deviation from linier antara variabel X dan Y ketik nilai Signifikansi ini lebih besar dari nilain 0,05 maka dapat dikatakan hubungan data variabel independen dan dependen memiliki hubungan yang linier. Dapat dilihat padatabel 4.6. dibawa ini :

Tabel 4.6.Hasil Pengujian Linieritas(AnovaTabel)

	Sum of Squ ares	Df	Mea n Squ are	F	Sug
PE_Y* DF_X1 Bet Ween (combined)	28,39	3	9,463	3,998	0,085
Groups		1	26,34 4	11,13	0,671
Linearity	26,34	2	1,02	0 ,43	

Deviation from linerity	2,045	5	3 2,367	2	
Within Groups	11,83	8			
Total	40,22				

Sumber: Data yang diolah, 2021

Hasil pengujian dari tabel 4.6. diatas, menunjukan bahwa model yang digunakan ternyata model linier. Hal ini dilihat dari hasil Oput nilai signifikansi dari Deviation from linearty lebih besara dari 0,05 yaitu : Nilai Sig Devition from linerity sebesar 0,671 > 0,05 sehingga dikatan hunbungan antara variabael independen dan depende ini memiliki hubungan yang linier.

3. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, ataudengan perkataan lain tidak terjadi heteroskedatisitas.Cara untuk mendeteksi ada tidak terjadinya heteroskedatisitas, yaitu dengan melihat scatterplot melalui titik penyebaran yang secara acak yang dapat dilihat scatterplot dibawah ini.

 ISSN: 2354-581X

Gambar 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas

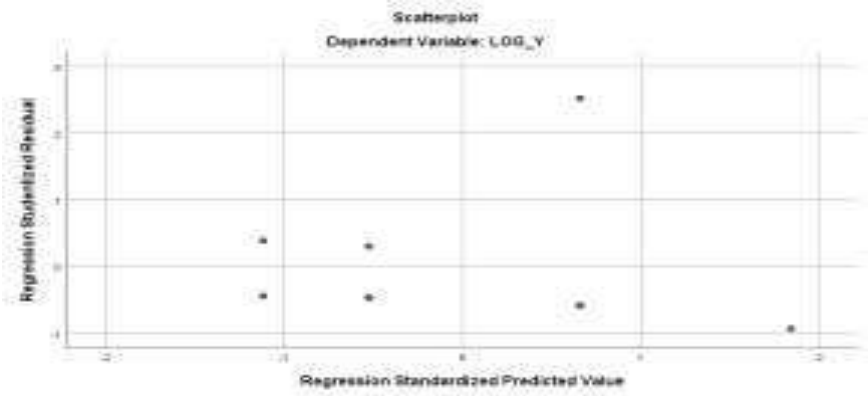

Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan grafik *scatterplot*terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakanbahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi. **Analisis Regresi Linier Sederhana**

Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier sederhana yang telah dilakukan maka diperoleh hasil sebagaiberikut :

Tabel 4.8. Hasil Regresi LinierSederhana Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	2,383	1,23		1,92	0,095
	Desentralisasi fiskal_X1	1,073	0,294	809	3,645	0,008

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi_Y Sumber: Data yang diolah,2021

Keterangan :

Y= a+bx

Dari tabel 4.7 diatas makah di ketahui :

α = 2.383 β = 1,073 t hitung = 0,008

Maka diperoleh persamaan Regresi Liniersederhananya adalah :

Y = 2.383 + 1,073

Berdasarkan hasi pengelolahan datadi atas maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut :

Dari persamaan diatas dapat di jelaskan bahwa dengan nilai persaman regresi linier sederhana tersebut di dapatkan bahwa dimana ketika nilai konstanta meningkat sebesar 2.383 % akan meningkatkan Desentralisasi Fiskal sebesar 1,073 %. Dengan demikian persamaan regresi linier sederhana menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan desentralisasi fiskal. Untuk lebih jelas melihat tingkat signifikas angka regresi (1,073) bisa di gunakan uji t.

- **Desentralisasi Fiskal**

Koefisien regresi Desenstralisasi Fiskal pertanda positif sebesar 1,073 artinya apabilah terjadi kenaikan Desentralisasi Fiskal 1 % maka, jumlah pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan 1,073 % dengan asumsi faktor lain konstan.Hasil penelitian regresi bernilai positif berarti terjadi

 ISSN: 2354-581X

hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi.jika semakin besar jumlah Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Kepulauan Sula maka semakin meningkata Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula.

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Adapun hasil uji F pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA[a]

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	26.344	1	26.344	13.287	.008[b]
	Residual	13.879	7	1.983		
	Total	40.222	8			

Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi_Y Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal _X1 Sumber: Data yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji signifikansi simultan (Uji F) diatas menunjukkan nilai sig.0,008 < 0,05, artinya H_o ditolak dan H_a dierima dan adanya pengaruh yang signifikan kurang lebih sebesar 95% dari variabel Desentralisasi Fiskal secara simultan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Atau menentukan pengujian dengan cara lain yaitu dengan menentukan terlebih dahulu F_{tabel} berdasarkan signifikansi 5% dimana N1 = 1 dan N2 = 7. Dengan pengujian tersebut maka hasil yang diperoleh

untuk F_{hitung} sebesar 13,287 sedangkan untuk F_{tabel} sebesar 4,22 ,artinya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} (13,287>4,22) maka dapat diartikan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwasecara simultan atau secara bersama sama ada pengaruh yang signifik an antara Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan ekonomi.

2. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada Desentralisasi Fiskal berpengaruh signifikan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error ofthe Estimate
1	.809[a]	.655	.606	1.408

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasildalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel

diatas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterimaa atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t_{tabel} = t (α/2;n- k-1) = t (0,294;7) = 0,004224.

- **Pengaruh Desentralisasi FisakalTerhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil tabel 4.8 di atasvariabel Desentralisasi Fisakalmenghasilkan jumlah t_{hitung} sebesar 3,645 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,645>0,004224) serta nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,008 (0,008<0,05) Sehinggadari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Desentralisasi Fiskalkurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula selama periode 2011 — 2019.

3. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinan inibertujuan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Yang dapat dilihat dari nilai Rsquare pada tabel 4.9 di bawa ini :

 ISSN: 2354-581X

Tabel 4.9. Hasil Uji KoefisienDeterminasi

Model Summary[b]

Predictors: (Constant), Desentralisasi Fiskal_X1 Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi_Y Sumber: Data yang Diolah,2021 Berdasarkan tabel 4.9 di atas peneliti dapa menjelaskan bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R Square* sebesar 0,606 atau (60,6 persen) artinya terdapat hubungan yang cuku p antara variabeli ndependen (X) terhadapdependen (Y) dengan ke eratan hubungan60,6 persen.

Pembahasan

Studi tentang derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja tidak dapat mengabaikan kajian terhadap faktor — faktor lain yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Vazquez dan Mc Nab (2001) menjelaskan salah satu issue yang perlu diperhatikan untuk studi lanjutan guna memperkuat keyakinan kita terhadap hasil empiris tentang derajat desentralisasi Fiskaldan pertumbuhan ekonomi adalah kemungkinan adanya kesalahan spesifikasi model estimasi. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiscal mempunyai pengaru posistif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya semakin tinggi desentralisasifiskal,semakin rendah pertumbuhanekonomi.

Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pelaksanaan otonomi daerah dan derajat desentralisasi fiskal didasari oleh Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Tujuan suatu daerah melaksanakan kebijakan desentralisasi adalah mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta kesenjangan antar daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi sumberdaya nasional, transparasi

alokasi dana transfer, dan mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro (Mardiasmo, 2009).

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan(Mardiasmon, 2004:28). Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di atas terkai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten kepulauan sula pada tahun 2011—2019 dengan menggunakan uji regresi sederhana. Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi sederhana pada variabel Derajat Desentralisasi Fiskal secara uji parsial berdasarkan hasil oputut menggunakan SPSS diketahui t_{hitung} derajat desentralisasi fiskal sebesar 3,645 artinya t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (3,645>0,004224) serta nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,008 (0,008<0,05) Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal kurang lebih 95 % memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula selama periode 2011 — 2019.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya dari Khalid (2015) yang menyimpulkan bahwa derajat desentralisasi fiskal perpengaru positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Dalam beberapa penelitian lain gagal mendapatkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, studi ini berkeyakinan bahwa terdapat bentuk himpshaped dalam hubungan antra derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagai mana hasil studi Zulyanto (2010) dan Akai et.al (2007)

Artinya desentralisasi fiskal akan perpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi jika derajat desentralisasi fiskal sudah terlampau tinggi, maka peningkatan desentralisasi fiskal justru

 ISSN: 2354-581X

akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.Adapun perbedaan perbedaan utama studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa fokus perhatian akan dilakukan terhadap daerah Kabupaten Kepulauan Sula, sementara penelitian lainnya kebanyakan berorientasi pada wilayah provinsi dalam suatu negara. Pertimbangan utamanya adalah bahwa Daerah Kabupaten sesunggunya merupakan ujung tombak pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Teori Koswara (2001), menjelaskan ciri utama yang menunjukan suatu daerah otonom mampu perotonomi terletak pada kemampuan keuangan untuk menggali sumber - sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantunan keuangan pada bantuan pemerintahan pemerintah pusast harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan Negara. Sedangakan di Kabupaten Kepulauan Sula pemerintahan daerah belum dapat mengoptimalkan pengalian potensi-potensi yang ada pada daerahnya dan proporsi bantuan (subsidi) pemerintahan masihsangat mendominasi keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.

Hal ini tercermin dari rata — rata bantuan (subsidi) pemerintah daerah dari pada besarnya PAD yang dapat dikumpulkan oleh daerah di Kapupaten Kepulauan Sula. pengimplementasian desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula masi belum terasa manfaatnya dan masi banyak aspek — aspek penerimaan yang masih menjadih wewenang pemerintahan pusat. Misalkan dari sektor pajak bumi dan bangunan dan berbagai sumber pajak berpotensi lainnya masi dikuasai oleh pemerintah propinsi/pusat, sehingga dari sisi penerimaan dapat dikatakan bahwa pengimplementasian desentralisasi fiskal masi belum berjalan dengan baik di Kabupaten Kepulauan Sula.

Pengukuran kinerja keuangan daerahyang banyak dilakukan antara lain dengan melihat rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).Prinsipnya, semakin besarsumbangan PAD kepada APBD akan menunjukan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.selain itu adanya perkembangan peningkatan pendapata dari PAD di suatu daerah, juga dapat memberikan gambaran bahwa daerah tersebut memiliki kinerja fiskal yang semakin baik. Satu hal yang perlu dicatat adalah peningkatan PAD bukan berarti daerah harus berlomba-lomba membuat pajak- pajak baru, tetapi lebih pada upaya memanfaatkan potensi daerah secara optimal (Khusaini, 2006). Besarnya proporsi PAD total terhadap total penerimaan daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di kemukakan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nilai Desentralisasi Fiskal Kabupaten kepulauan sula dari tahun 2011 — 2019 rata — rata di katagorikan sangat kurang sebesar 8,33 %,Sedangakan Nilai tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula rata — ratanyamengalami penurunan sebesar 4,28% dinyatakan belum mandiri Dan Pertumbuhan Ekonominya Kabupaten Kepulauan Sula yangdilihat dari Nilai PDRB riil atas dasar harga konstanya dari tahun 2011 —2019 rata — rata meningkat sebesar9,44%.
2. Berdasarkan hasil uji secara simultan menunjukan bahwa Desentralisasi Fiskal berpengaru positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,008<0,05, dimana kurang lebih 95 % variabel Independen perpengaru signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini sesuia dengan penelitian yang dilakukan oleh Khalid (2015) pada penelitian terdahuu.

Saran

 ISSN: 2354-581X

Berdasarkan pengujian dan pembahasan mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhanekonomi Kabupaten Kepulauan sula.Berikut ini diajukan beberapa saran yangberkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula diharapkan kedepannya akan lebih memanfaatkan potensi - potensi Daerah untuk meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD), dengan begitu pemerintah dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya menggunakanpendapatan asli daerah tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula dapat menigkatkan Nilai Desentralisasi fiskal agar lebih berkotribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Bagi penelitian selanjutnyadiharapkan dapat menembahkan indikator untuk mengukur pengaruh desentralisasi Fiskal terhadap pertumbuhan. Menggunakan data terbaru,dan memperluas objekpenelitian agar hasil yang di dapatkan lebih baik lagi.
3. Bagi penulis menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini masihbanyak kekurangan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kepulauan Sula.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah.*Yogyakarta: Graha Ilmu.

Anitasari, M, dan Soleh, A. (2015). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. EKOMBIS REVIW: *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 3(20).*

Akai, Nobuo, dan Sakata, Masayo. (2002) *Fiscal Decentralization Contributes To Economic Growth : Evidence From State – Leve Cross – Section Data For The United States. Journal Of Urban Economics 52 (200) 93 – 108.*

Bangun,A.(2009).*Pengaruh Partisipasidalam penyususnan anggaran,Kejelasan Sasaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi* (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang) (Master'sthesis).

Bahl. (2002). Tax Payer Choice in Future Tax Shifts. Tax Review.Vol.XXXIII, No.11,pp.75- 88.

Bahl, Roy W. Johanes linn, 1992, Urban Public Finance in Developin contriesk, New york oxpord University Press

Boediono, (1992) *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Ed. 1, BPFE Universitas Gaja Mada,Yogyakarta.

BPS Kabupaten Kepulauan Sula. (2021). *Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Angka Tahun (2021)*.Bps Kabupaten Kepulauan Sula.Sanana.

Demora, V. (2016). *Analisis Derajat Desentralisisi Fiskal dan Kemandirian PAD serta hubungannyan dengan Produktivutas belanja daerah di Kota Jambi*. E-Jurnal Prespektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 5(1), 13-20.

Ebel,dkk. (2002). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD. Politeknik Negeri Ambon. Maluku.

Ebel, Robert D. dan Yilmaz, Seidar, (2002), *Concept of fiscal Decentrali zationand world wide overview. Word Bank Institute,*Tersedia:http://www.worldbank.org

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi keuangan daerah, akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

 ISSN: 2354-581X

Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007. *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita. Simposium NasionalAkuntansi X, Juli* 2007.

Khalid, I. (2015). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap PertumbuhanEkonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Universitas MuhammadiyahMakas*